



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 673/DJU/SK.HK1.2.2/VI/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PANJAR BIAYA
EKSEKUSI DAN REVISI BUKU JURNAL KEUANGAN ELEKTRONIK SERTA
PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014
TAHUN ANGGARAN 2024**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan pengelolaan keuangan perkara eksekusi pada pengadilan di lingkungan peradilan umum maka perlu disusun suatu kebijakan untuk menjadi pedoman pengelolaan panjar biaya eksekusi di lingkungan peradilan umum;
 - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan yang efektif, efisien dan modern diperlukan penerapan buku jurnal keuangan secara elektronik sebagai cara pengelolaan keuangan perkara yang memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan perkara, maka perlu dipastikan seluruh buku jurnal yang digunakan dalam administrasi keuangan perkara sudah terakomodir dalam SIPP;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan

Negeri, maka Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga perlu dilakukan penyusunan panjar biaya eksekusi dan revisi buku jurnal keuangan elektronik serta perubahan petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

- d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan terkait panjar biaya eksekusi dan revisi buku jurnal keuangan elektronik serta perubahan petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014;
- e. bahwa memperhatikan huruf a, b, c dan d untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang penyusunan kebijakan terkait panjar biaya eksekusi dan revisi buku jurnal keuangan elektronik serta perubahan petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
 4. Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
 5. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1153/DJU/HM02.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 Hal Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
13. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2024 tanggal 24 November 2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PANJAR BIAYA EKSEKUSI DAN REVISI BUKU JURNAL KEUANGAN ELEKTRONIK SERTA PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peserta pada kegiatan penyusunan kebijakan terkait panjar biaya eksekusi dan revisi buku jurnal keuangan elektronik serta perubahan petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

KEDUA : Peserta dibebaskan tugaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal 16 s.d 19 Juli 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2024 tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada 19 Juni 2024



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I

Keputusan Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum

Nomor 673/DJU/SK.HK1.2.2/VI/2024

Tanggal 19 Juni 2024

**PESERTA KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PANJAR BIAYA EKSEKUSI DAN
REVISI BUKU JURNAL KEUANGAN ELEKTRONIK SERTA PERUBAHAN PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	GOL/RG	SATKER	SATKER
	NIP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera	Pengadilan Tinggi Jakarta
	Nip.196411101987021001			
2.	Dwi Setyo Kuncoro, S.H., M.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Nip.196712171991031005			
3.	Marlin Simanjuntak, S.H., M.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
	Nip.196904131990031005			
4.	Dr.Ahyar Parmika, S.H., M.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera	Pengadilan Negeri Semarang
	Nip.197012271992031002			
5.	Mustafa Djafar, S.H., M.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera	Pengadilan Negeri Bandung
	Nip.197204111992031001			
6.	Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera	Pengadilan Negeri Tangerang
	Nip.197309081994032003			
7.	Muhammad Anis,S.E.,Ak.,M.Ak	Pembina Utama Muda (IV/c)	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Wilayah I Badan Pengawas
	Nip.197805052006041002			
8.	Imam Purnomo,S.E, A.k.	Pembina Tingkat I (IV/b)	Auditor Ahli Madya	Badan Pengawas
	Nip.198109092006041002			
9.	L.R. Sophan Girsang, S.H., M.H	Pembina Tingkat I (IV/b)	Panitera Muda Perdata	Pengadilan Tinggi Jakarta
	Nip.196206131989121003			

NO	N A M A		GOL/RG	SATKER	SATKER
	NIP				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
10.	Iyus Yusuf, S. H., M.H		Pembina Tingkat I (IV/b)	Panitera	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
	Nip.196901031989031002				
11.	Rotua Roosa Mathilda T., S.H., M.H		Pembina Tingkat I (IV/b)	Panitera	Pengadilan Negeri Denpasar
	Nip.197003051991032001				
12.	Yusrizal, S.H., M.H		Pembina Tingkat I (IV/b)	Panitera	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
	Nip.197301161993031001				
13.	Agus Sukmana, S.H., M.M		Pembina Tingkat I (IV/b)	Panitera	Pengadilan Negeri Bogor
	Nip.196606111987031001				
14.	Eko Suharjono, S.H.,M.H.		Pembina Tingkat I (IV/b)	Panitera	Pengadilan Negeri Cibinong
	Nip.196711211997031001				
15.	Ravita Lina, S.H., M.H		Pembina Tingkat I (IV/b)	Panitera	Pengadilan Negeri Depok
	Nip.196811061989032002				
16.	Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M		Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Pengadilan Negeri Cibinong
	Nip.197009121990031001				
17.	H. Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M		Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Pengadilan Negeri Tangerang
	Nip.197811091998031002				
18.	Jara Lumbanraja, S.H., M.H		Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	Pengadilan Tinggi Jakarta
	Nip.196607091989031003				
19.	Cik Akip, S.H., M.H		Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata	Pengadilan Negeri Jakarta Timur
	Nip.196707051993031009				
20.	I Gede Renasa, S.H., M.H		Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Nip.197306161993031004				
21.	Hartanto, S.H., M.H		Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
	Nip.197210201993031001				

NO	N A M A		GOL/RG	SATKER	SATKER
	NIP				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
22.	Edi Sarwono, S.H., M.H		Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perdata	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
	Nip.197302171997031001				
23.	Johana Carolina Lekbila, S.IP., S.H		Pembina (IV/a)	Panitera	Pengadilan Negeri Jayapura
	Nip.197303151992032001				
24.	Rama Rahim, S.E.,M.M.,MBA.		Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Akuntansi	Badan Urusan Administrasi
	Nip.198105202009121002				
25.	Agus Sofyan, S.H		Penata Tingkat I (III/d)	Panitera	Pengadilan Negeri Cirebon
	Nip.197511162000031002				
26.	Mulia Rahman, S.H.		Penata Muda (III/a)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Badan Urusan Administrasi
	Nip. 199011132009041001				
27.	Mushaddiq Amir,S.H.,M.H.		Penata Muda (III/a)	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	Nip.19960923202012009				
28.	Marcelina Purba,S.H.		Penata Muda (III/a)	Klerek- Analisis Perkara Peradilan	Pengadilan Tinggi Jakarta
	Nip.199408262024052001				
29.	Rachmat Saputra,S.H.		Penata Muda (III/a)	Klerek- Analisis Perkara Peradilan	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
	Nip. 199209182020121004				
30.					Direktorat Jenderal Anggaran

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2024

